

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Praktis.....	8
2. Kegunaan Akademis.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12

A. Tinjauan Umum mengenai Hukum Antariksa.....	12
1. Penggunaan Istilah Antariksa.....	12
2. Sejarah dan Proses Pembentukan Hukum Antariksa.....	14
3. Prinsip-Prinsip Hukum Antariksa.....	18
B. Tinjauan Umum mengenai Prinsip <i>Freedom of Exploration and Use of Outer Space</i>	22
C. Tinjauan mengenai Teknologi Propelan.....	30
1. Definisi dan Fungsi Teknologi Propelan.....	30
2. Pengaturan terkait Teknologi Propelan.....	31
a) Pengaturan terkait Teknologi Propelan di tingkat Internasional.....	31
b) Pengaturan terkait Teknologi Propelan di tingkat Nasional.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
B. Bahan Penelitian.....	38
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	40
D. Analisis Data.....	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Keberadaan Prinsip <i>Freedom of Exploration and Use of Outer Space</i> dalam Perkembangan Hukum Keantariksaan Internasional.....	42

1. Kondisi Hukum Keantariksaan Internasional saat ini.....	42
2. Keberadaan Prinsip <i>Freedom of Exploration and Use of Outer Space</i> dalam Kerangka Hukum Internasional.....	54
3. Praktik Negara-Negara dalam melaksanakan Prinsip <i>Freedom of Exploration and Use of Outer Space</i>	79
a) Amerika Serikat.....	80
b) Republik Rakyat Tiongkok.....	81
c) Malaysia.....	84
d) Luksemburg.....	85
e) Brazil.....	86
 B. Pelaksanaan Prinsip <i>Freedom of Exploration and Use of Outer Space</i> sehubungan dengan Pengembangan Teknologi Propelan di Indonesia.....	90
1. Pengaturan terkait Keantariksaan di Indonesia.....	90
a) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.....	92
b) Pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan tahun 2016-2040....	97
2. Misi Kemandirian Peluncuran Wahana Antariksa.....	99
a) Urgensi Peluncuran Wahana Antariksa secara Mandiri.....	99

b) Peranan Propelan dalam mendukung Kemandirian Peluncuran	
Wahana Antariksa.....	101
3. Pengembangan Teknologi Propelan di Indonesia.....	103
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN I Daftar Aturan Pelaksana Amanat Undang-Undang Nomor 21	
Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang belum Terbit.....	129
LAMPIRAN II Ilustrasi Rancangan Roket Pengorbit Satelit.....	132